

BIDANG KETAHANAN PANGAN

Ketersediaan Pangan

1. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana seperti pupuk yang tidak selalu tersedia setiap saat dan harga subsidi yang hampir tidak bisa dinikmati petani;
2. Terbatasnya ketersediaan benih bermutu, alat dan mesin pertanian yang juga masih terbatas;
3. Kondisi curah hujan yang sulit diprediksi dan dengan intensitas yang cukup tinggi sering kali menyebabkan banjir ataupun kekeringan yang berakibat pada rusaknya tanaman;
4. Serangan hama merupakan masalah yang belum dapat dikendalikan serta cukup tingginya kehilangan hasil akibat penanganan pasca panen yang kurang tepat;
5. Serta keterbatasan sarana pengairan, jalan usaha tani dan lainnya menjadikan usaha peningkatan ketersediaan pangan menjadi kurang produktif, tidak efisien dan sering kali tidak menguntungkan. Hal ini pula yang menjadi penyebab banyak petani hanya melakukan pola usaha tani yang menerapkan teknologi tradisional.

Distribusi dan Akses Masyarakat Terhadap Pangan

1. Bervariasinya kemampuan untuk memproduksi pangan antar daerah menghendaki dikembangkannya sistem distribusi pangan yang lebih baik dan efisien;
2. Adanya keterbatasan dukungan sarana prasarana seperti jalan, kendaraan, pelabuhan ditambah dengan adanya perubahan iklim yang ekstrim pada waktu tertentu dan terbatasnya kelembagaan pasar dapat menghambat kelancaran distribusi bahan pangan dari suatu daerah ke daerah lainnya dan dengan biaya angkut yang relatif tinggi sehingga para konsumen harus membayar dengan harga yang lebih mahal;
3. Hambatan distribusi bahan pangan karena rusaknya jalan;
4. Dari sisi ekonomi aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pangan sangat ditentukan oleh daya beli. Bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan

rendah atau miskin dan pengangguran akan mengalami hambatan untuk memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas.

Konsumsi Pangan

1. Masih tingginya tingkat konsumsi bahan makanan dari kelompok padi - padian menggambarkan tingginya ketergantungan masyarakat akan bahan pangan khususnya beras.
2. Keterbatasan dalam mengakses pangan baik secara fisik maupun secara ekonomi seperti telah diuraikan pada aspek distribusi;
3. Lemahnya kesadaran akan pola konsumsi yang sehat. Pada kalangan tertentu bahkan berkembang anggapan belum makan apabila belum makan nasi.

Keamanan Pangan

1. Dibidang keamanan pangan masih terjadi kasus - kasus penggunaan bahan berbahaya dalam pangan, seperti formalin, borax, rhodamin B, metanil yellow dan penggunaan bahan tambahan pangan yang berlebihan;
2. Masih kurangnya kesadaran produsen dan konsumen tentang pentingnya menjaga keamanan pangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang belum konsisten;
3. Pengawasan yang masih terbatas, bahan berbahaya yang beredar luas dan mudah didapat.

Kerawanan Pangan

1. Masih sering terjadi kasus rawan pangan baik yang sifatnya transien maupun kronis;
2. Adanya kasus - kasus kurang gizi, gizi buruk dan juga kondisi masih tingginya angka kematian bayi, tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya angka harapan hidup dan lain sebagainya merupakan gambaran dari adanya rawan pangan dan lemahnya tingkat ketahanan pangan yang disebabkan oleh bencana alam (banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit);
3. Keterbatasan penguasaan sumberdaya alam dan tingkat pengetahuan yang masih terbatas sehingga produksi rendah;

4. Keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan aliran bahan pangan tidak lancar disertai naiknya harga bahan pangan;
5. Masih cukup tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan akses masyarakat secara ekonomi terbatas, pola konsumsi yang belum tepat, pola asuh yang belum tepat, kurangnya pemahaman tentang pola hidup dan pola konsumsi yang baik.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Adalah “**Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAKYAT)**” dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 s/d 2026 berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang bertumpu pada sector Pertanian dan Perikanan
2. Membangun Sumberdaya Manusia yang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang kompetitif dan Lestari
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.

Dari 4 (empat) misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tersebut guna mendukung misi diatas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menelaah misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah pada misi ke 1 (satu) yang berbunyi : Mewujudkan masyarakat sejahtera yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan, dan Pada misi yang ke 4 (empat) yang berbunyi : Mewujudkan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan Harmonis.

Tabel 3.2. yang menggambarkan telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Periode 2021 s/d 2026 :

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT “ MERAKYAT”			
Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
MISI 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN			
Tujuan : 1 Meningkatkan Daya saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan			
Sasaran 1. Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat			
Program Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Kegiatan Penyediaan Infrastuktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten/kota Subkegiatan 1. Penyediaan infrastruktur lumbung pangan 2. Penyediaan infrastruktur Lantai Jemur 3. Penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Meratanya Infrastruktur Lumbung Pangan terutama di sentra produksi dan Desa Rawan Pangan - Belum termanfaatkan secara optimal lumbung pangan yang ada - Masi Kurangnya SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal Kemandirian Masyarakat/Pertanian baik SDM Maupun Keuangan. - Tingkat kemiskinan Pertanian yang relative lebi tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sumber cadangan Pangan, terutama beras - Teknologi informatika yang berkembang

<p>Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</p> <p>Kegiatan Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan Dan harga Pangan.</p> <p>Sub Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan 2. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya. 3. Pemantauan stock pasokandan harga pangan 4. Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Distribusi Pangan 5. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan TT <p>Kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota</p> <p>Subkegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota 2. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota <p>kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</p> <p>Subkegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penetapan target Komsumsi pangan perkapita pertahun 2. Pemberdayaan masyarakat dalam Penganekaragaman konsumsi pangan perkapita/pertahun 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita pertahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya Pengetahuan dan sika masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan - Masih rendahnya koordinasi antara instansi Terkait. - Bantuan Dana baik fisik maupun mater belum merata. - Masih kurangnya stock cadangan pang Pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan budidaya dan pengolahan masih kurag - Sebagian lahan pekarangan sering terendam air pasang - Sumber daya Manusia dan Kurang memadai baik segi kualitas maupu kuantitas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi lahan pekarangan cukup luas - Produksi dari tanaman masih didatangkan dari luar daerah. - Kecukupan SDM serta pendidikan dan pelatihan yang menunjang . - Membina dan memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha yang berpotensi - Adanya bansos yang dapat meningkatkan usaha kelompok dan usaha permodalan - Dengan adanya dana bansos ke gapoktan akan mendorong dan meningkatkan kinerja gapoktan sehingga dapat menstabilkan ha pasar.
--	--	--	--

<p>Program Penanganan Kerawan Pangan</p> <p>Kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan</p> <p>Subkegiatan penyusunan, pemutahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan</p> <p>Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota</p> <p>Subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota</p>	<p>Kondisi Ketahanan Pangan Masyarakat di beberapa wilayah/desa masih ada rawan pangan</p>	<p>Belum terpenuhinya 9 (sembilan) Indikator Ketahanan Pangan</p>	
<p>Program pengawasan dan keamanan pangan</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Subkegiatan rekomendasi keamanan pangan PSAT daerah kabupaten/kota</p>	<p>Masih ditemui produk pangan yang berbahaya dan terbatasnya informasi mengenai keamanan pangan Asal tumbuhan di masyarakat</p>	<p>Kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan siap saji</p>	<p>- Adanya Balai Pengawas Obat dan makanan untuk menganalisis kandungan zat kimia berbahaya di dalam makanan</p> <p>-</p>

3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan Renstra Provinsi Jambi

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya pada peningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi juga apakah peningkatan produksi pangan tersebut sudah dapat memperbaiki gizi masyarakatnya. Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan harus bersifat holistik, realistik, kontinyu dan aktual. Konsekuensinya dalam pembuatan perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus diperlihatkan, tetapi juga mengenai bagaimana caranya merumuskan pilar ketersediaan dan Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yaitu pengembangan SDM, mengacu pada kondisi lingkungan pertanian khususnya pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi 2015- 2019, yaitu: “ Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai “lead institution” dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapaivisi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
6. Meningkatkan keamanan pangan segar.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah menetapkan visi untuk periode 2016 – 2021 yaitu: “Terwujudnya Ketahanan Pangan Yang Mandiri dan Berdaulat Menuju Jambi TUNTAS 2021”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Dinas Ketahanan *Provinsi Jambi mengemban* misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan yang berbasis sumberdaya lokal.
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan.
3. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk pangan pokok.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat menjadi beragam, bergizi seimbang dan Aman (B2SA).
5. Meningkatkan tata kelola ketahanan pangan yang bersih transparan akuntabel dan partisipatif dalam pelayanan publik.

Tabel. 3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan Renstra Provinsi Jambi

NnnnNO	Indikator Knerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Jangka Menengah 2021-2026	Sasaran pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Jangka Menengah 2021-2026	Sasaran pada Renstra Badan Ketahanan Pangan 2020-2024
11	2	3	4	5
1	Ketersediaan Konsumsi Energi	1. Meningkatnya Produk olahan pangan lokal	1. Menigkatnya Skor PPH	1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
2	Skor PPH	2. Meningkatnya sistem distribusi, stabilitas harga	2. Menurunnya jumlah Penduduk Rawan Pangan 1 % Pertahun	2. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis
3	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan		3. Ktersediaan energy	

4	Persentase peningkatan produk pangan lokal	pangan dan diversifikasi konsumsi pangan masyarakat serta penanganan daerah rawan pangan	minimal 2.400 Kg/Perkapita/Hari dan Protein sebesar 63 gram/perkita/hari	nasional
5	Persentase Penyediaan Infrastruktur pangan		4. Stabila harga pangan pokok dan strategis di tingkat produsen dan konsumen	
6	Prevalensi Harga pangan		5. Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPPD) beras dan masyarakat untuk mengantisipasi kerawanan pangan	
7	Persentase pengawasan dan keamanan pangan	3. Meningkatkan Ketersediaan pangan 4. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan	6. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang B2SA	
8	Indeks Pelayanan Instansi			
9	Nilai AKIP	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah menuju kelola dan akuntabilitas layanan pemerintah yang professional		
10	Nilai Laporan Keuangan			

3.4. Telaahan RT/RW dan KLHS RPJMD

RTRW merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat karena menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Tabel 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan sudah menjadi masalah global, ancaman krisis pangan	Pengaruh alam yang sangat besar akibat banjir dan intuisi air laut pada sebagian besar lahan pertanian tanaman pangan	Tersedianya lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang cukup
		Program, kegiatan ketahanan pangan adalah peningkatan ketahanan pangan sementara alih fungsi lahan pertanian semakin luas	Saat ini nilai jual komoditi perkebunan (kelapa sawit / karet) sangat menjanjikan/harga jual yang sangat tinggi dibandingkan harga pangan	Dukungan dana Bansos untuk pengembangan pangan serta bantuan bibit/benih dan pupuk dari instansi teknis terkait
		Dinas Ketahanan Pangan fungsinya bukan teknis tetapi fungsinya hanya koordinasi (non teknis)	Akibat fungsinya sebatas koordinasi maka dalam penyampaian informasi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat	Adanya dukungan dana Bansos untuk penguatan modal kelompok baik kelompok tani maupun Gapoktan
		Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap pengolahan pangan lokal sumber karbohidrat non beras Sulitnya menghilangkan kebiasaan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi makanan siap saji	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan budidaya dan pengolahan masih ..kurang - Sebahagian lahan pekarangan sering terendam air ..pasang - Kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi ..makanan siap saji 	<p>Potensi lahan pekarangan cukup luas Produksi dari tanaman pekarangan khususnya sayuran masih didatngkan dari luar daerah</p> <p>Adanya Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk menganalisis kandungan zat kimia yang membahayakan di dalam makanan</p>

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan adalah masih terjadinya :